

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan otonomi memberikan peluang bagi daerah untuk mengaktualisasi kewenangan dan kemandiriannya dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah untuk kesejahteraan penduduknya.² Pelaksanaan otonomi daerah telah dilakukan banyak negara termasuk Indonesia. Otonomi daerah terdapat dalam Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan pusat dan daerah yang memberikan kewenangan atau otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional.³ Otonomi atau desentralisasi merupakan pemberian hak dan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintahan dibawahnya atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk melakukan pelayanan publik yang lebih tepat dan mewujudkan mekanisme pengambilan keputusan dengan lebih demokratis. Keberhasilan tercapainya otonomi daerah tergantung pada kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dengan tanggungjawab, ekonomis, rinci, transparan, efektif dan efisien sesuai peraturan perundang-undangan. Desentralisasi meliputi desentralisasi politik, administratif, dan fiskal

² Muhammad Zulkarnain, Yulina Astuti, dan Erni Wiriani, "Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal di Kota Langsa," *Jurnal Samudra Ekonomika*, 3, no. 1 (2019): 65.

³ Nurhemi Nurhemi dan Guruh Suryani R, "Dampak Otonomi Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia," *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan* 18, no. 2 (2 Desember 2015): 183–206, <https://doi.org/10.21098/bemp.v18i2.522>.

Desentralisasi fiskal sebagai komponen utama desentralisasi kewenangan pemerintahan, sehingga desentralisasi fiskal harus ditunjang dengan sumber keuangan yang sesuai baik berasal dari pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak dan non pajak, pinjaman, serta subsidi dari pemerintah pusat. Kemampuan keuangan daerah ditunjukkan melalui anggaran daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran disusun dengan memperhatikan potensi-potensi daerah yang ada sehingga formulasi anggaran sesuai dengan kebutuhan obyektif daerah.⁴

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah). Seluruh penerimaan daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD dan seluruh pengeluaran daerah serta ikatan yang membebani daerah dalam pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah. APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja dari perencanaan alokasi biaya yang ditetapkan.⁵

⁴ Andi Hamsiah, *Manajemen Keuangan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah* (Azkiya Publishing, 2019).

⁵ *Ibid.*, hal 47

Dalam Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2004 menetapkan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dengan memperhatikan kinerja yang akan dicapai.⁶ Penyusunan perencanaan analisis APBD yang didalamnya meliputi sebagian besar anggaran yang disalurkan oleh pemerintah daerah sebelum APBD tersebut direalisasikan. Kemudian tujuan yang akan dicapai adalah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Adanya hubungan antara pertumbuhan dan anggaran dengan hasil yang sesuai maka dapat menunjukkan bagaimana kinerja keuangan daerah. Selain itu kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dapat diukur dengan bagaimana kinerja pemerintah dalam membangun daerahnya.

Karesidenan Kediri adalah sebuah wilayah administratif berbentuk karesidenan yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Kota/kabupaten yang termasuk dalam wilayah Karesidenan Kediri yaitu Kota Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten Trenggalek. Wilayah karesidenan Kediri memiliki banyak potensi yang berpeluang untuk dikembangkan.

Sekitar lima tahun belakang ini beberapa kepala daerah wilayah karesidenan Kediri membicarakan mengenai peluang pembangunan bandara di wilayahnya. Kabupaten Kediri mengaku siap namun terhambat wilayah udara karena menjadi bagian dari wilayah udara latihan Lanud Iswahyudi sehingga tidak layak untuk lalu lintas udara komersil. Selain itu kesiapan juga disampaikan oleh kabupaten Tulungagung dan Trenggalek untuk kesiapan

⁶ “Undang-Undang No.17 Tahun 2004 Tentang Keuangan Negara,”

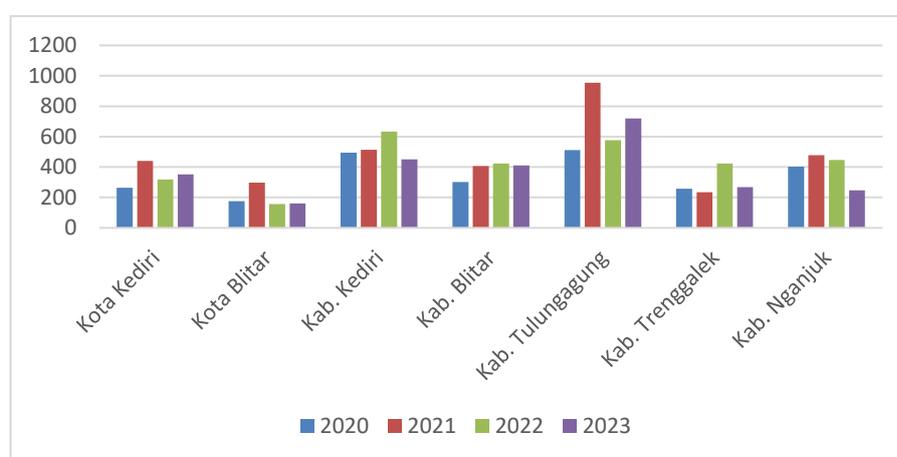
lahan. Akhirnya, pembangunan bandara Kediri akan menggunakan skema KPBU antara PT Gudang Garam sebagai pemilik lahan dengan PT. Angkasa Pura I sebagai operator bandara. Dengan pembangunan bandara ini berpotensi sebagai pintu gerbang perekonomian serta pendukung kegiatan industri dan perdagangan. Sehingga keberadaan bandara di wilayah Karesidenan Kediri cukup diharapkan dan dapat menjadi penghubung dengan wilayah lain Indonesia melalui jalur udara.⁷

Wilayah Karesidenan Kediri memiliki berbagai potensi dari sektor perdagangan maupun industri. Di wilayah Kediri terdapat sektor industri pengolahan yang sangat dikenal yaitu PT.Gudang Garam, merupakan industri pengolahan bahan baku mentah menjadi barang jadi dengan jumlah tenaga kerja sangat banyak dan PT.Gudang Garam juga berkontribusi dalam perolehan pendapatan daerah. Di Tulungagung terdapat industri yang menjadi salah satu pusat pengolahan marmer di Indonesia. selain itu juga memiliki potensi unggul pada sektor perikanan yang cukup besar di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (PPN) Kabupaten Trenggalek. Kabupaten Blitar juga berpotensi pada wisata budaya, yaitu Makam Bung Karno, sebagai presiden pertama Republik Indonesia, yang tidak pernah sepi dari kunjungan wisatawan. Dengan berbagai potensi tersebut, jika pengelolaannya dilakukan secara optimal maka dapat mendukung perekonomian di daerah tersebut dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketika pendapatan asli daerah semakin meningkat maka bisa tingkat ketergantungan pada pemerintah

⁷ Aris Subagiyo, "Bandara Kediri, Faktor Kebutuhan dan Pengungkit Ekonomi di Koridor Barat Daya Jawa Timur," 2021, <http://arissubagiyo.lecture.ub.ac.id/2021/05/03/page/2/>. Diakses pada 11 September 2023.

pusat ikut rendah, sehingga manajemen keuangan daerah dikatakan baik. Berikut nilai Pendapatan Asli Daerah wilayah Karesidenan Kediri tahun 2020-2023.

Gambar 1.1
Nilai Pendapatan Asli Daerah Wilayah Karesidenan Kediri Tahun 2020-2023 (dalam milyaran rupiah)



Sumber: djpk Kementerian Keuangan, 2024

Dapat dilihat pada grafik diatas bahwa nilai pendapatan asli daerah setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan. Nilai pendapatan asli daerah pada tahun 2020 yang tertinggi yaitu Kabupaten Tulungagung sebesar 510,55 milyar, sedangkan yang terendah yaitu Kota Blitar sebesar 174,59 milyar. Nilai pendapatan asli daerah pada tahun 2021 yang tertinggi yaitu Kabupaten Tulungagung sebesar 953,89 milyar dan yang terendah Kabupaten Trenggalek sebesar 233,49 milyar. Nilai pendapatan asli daerah pada tahun 2022 yang tertinggi yaitu Kabupaten Kediri sebesar 633,55 milyar, sedangkan yang terendah yaitu Kota Blitar sebesar 156,27 milyar. Kemudian nilai pendapatan asli daerah pada tahun 2023 yang tertinggi yaitu Kabupaten

Tulungagung sebesar 719,59, sedangkan yang terendah yaitu Kota Blitar sebesar 160,46.

Menurut penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah diantaranya, jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah dan inflasi. Meningkatnya jumlah penduduk berpengaruh pada pendapatan asli daerah jika sejalan dengan peningkatan ide, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mempunyai bakat dan kreativitas, dan peningkatan tenaga ahli. Selanjutnya pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah investasi atau pembelian aset dan pembangunan infrastruktur umum yang nantinya akan meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah. Selain itu penurunan pendapatan asli daerah juga dapat disebabkan oleh menurunnya konsumsi masyarakat karena menurunnya pendapatan riil masyarakat.⁸

Seluruh pemerintahan daerah termasuk pemerintah daerah wilayah Karesidenan Kediri memiliki tugas dan kewajiban untuk menciptakan hidup makmur dan sejahtera bagi masyarakatnya. Peran pemerintah sangat diperlukan dalam mengelola potensi dari daerah tersebut baik dari sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun manajemen keuangan secara optimal. Pengelolaan manajemen keuangannya dapat menggunakan rasio keuangan yang umum dipakai daerah, meliputi rasio kemandirian, rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi.

⁸ Aris Adi Prasetyo, Virgiana Nugransih Siwi, dan Eranus Yoga Kudhani, "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah Tahun 2010-2018," *Jurnal Dinamika Ekonomi Rakyat* 1, no. 1 (2022): 38–39.

Rasio kemandirian untuk mengukur kemampuan atau tingkat kemandirian pemerintahan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahannya. Rasio kemandirian menunjukkan partisipasi dari masyarakat dalam membangun daerah. Ketika rasio kemandirian meningkat maka dapat menambah partisipasi dari masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi yang menjadi unsur penting pendapatan asli daerah.⁹ Kemandirian keuangan daerah dapat ditingkatkan melalui pengelolaan pendapatan asli daerah secara optimal agar dapat mengurangi tingkat ketergantungan dari pemerintah pusat.

Rasio desentralisasi fiskal untuk melihat tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah oleh pemerintah pusat. Dengan rasio desentralisasi fiskal dapat menunjukkan perbandingan antara total Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Pendapatan Daerah yang terkait desentralisasi fiskal. Tingginya tingkat pelaksanaan desentralisasi maka kontribusi pendapatan asli daerah juga tinggi dalam menghasilkan pendapatan daerah.¹⁰

Efektivitas adalah keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas hanya berbicara *output* saja. Jika suatu organisasi telah mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut berjalan

⁹ Muh Zainul Muzaki M dan Mega Tunjung Hapsari, "Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Efektivitas, Dan Rasio Efisiensi, Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 – 2021," *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan* 2, no. 1 (31 Desember 2022): hal 292,

¹⁰ Natalia Mega Selvi dan Mega Tunjung Hapsari, "Kinerja Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Sebelum, Saat, Dan Pasca Pandemi Covid19 (Tahun 2017-2022)," *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Auditing* 4, no. 1 (2023): 206.

dengan efektif.¹¹ Rasio efektivitas untuk mengukur tingkat kemampuan pemerintahan daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah sesuai target sebelumnya. Rasio efektivitas sebagai presentasi dari hasil kemampuan pemerintah untuk merealisasikan rencana anggaran dengan target sesuai potensi daerah.

Rasio efisiensi adalah rasio yang merepresentasikan perbandingan input dengan output ataupun realisasi pengeluaran dengan pendapatan daerah. Jika rasio berkurang maka efisiensi bertambah baik.¹² Rasio efisiensi untuk melihat tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran untuk pemenuhan pendapatan secara efisien.

Analisis rasio keuangan pada APBD sesudah dianggarkan dan direalisasikan merupakan alat ukur untuk menilai kemampuan keuangan daerah. Analisis rasio keuangan ini dilakukan dengan membandingkan antara periode sekarang dengan periode sebelumnya kemudian hasilnya akan terlihat bagaimana kinerja yang dicapai.

Keuangan daerah adalah kegiatan yang dilakukan daerah terkait hak dan kewajibannya dalam mengelola keuangan yang dimiliki yang dapat diukur dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.¹³ Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan tujuan untuk

¹¹ Lisa Umami, "Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Keuangan Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. SoedomoTrenggalek Ditinjau dari Perspektif Islam" (Tulungagung, IAIN, 2019).

¹² Ibid, hal 293.

¹³ "Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah," t.t.

memperbaiki kinerja pemerintah, membantu mengalokasikan sumber daya daa pembuatan keputusan serta mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.¹⁴ Kinerja keuangan mencerminkan apakah daerah tersebut mampu mencapai tujuan dan visi misinya yang telah dirancang sebelumnya. Namun, dalam pelaksanaannya harus tetap sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah maka pemerintah daerah dianggap berhasil dan mampu dalam menjalankan otonomi daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti bertujuan untuk melakukan analisis kinerja keuangan daerah wilayah Karesidenan Kediri periode 2020 sampai 2023. Peneliti menggunakan wilayah ini dikarenakan memiliki kekayaan dan potensi yang baik sehingga tertarik untuk mengukur seberapa tingkat kemampuan kinerja keuangan daerah di wilayah terebut. Dengan demikian penulis mengangkat judul “Analisis Kinerja Keuangan Daerah Karesidenan Kediri Tahun 2020-2023”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan, selanjutnya perlu dilakukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Dalam mengukur kinerja keuangan daerah menggunakan rasio keuangan daerah yang nilainya berdasarkan pada laporan anggaran pendapatan dan belanja daerah wilayah Karesidenan Kediri tahun 2020-2023. Jika hasil penghitungan kinerja keuangan daerah tidak stabil yaitu mengalami kenaikan ataupun penurunan yang bisa saja disebabkan oleh beberapa hal

¹⁴ Zulkarnain dkk, Pengaruh Rasio Keuangan Daerah ..., hal 67

diantaranya tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat masih tinggi, tingkat belanja daerah yang tinggi, dan pengelolaan kekayaan potensi daerah yang kurang optimal baik dari sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya.

2. Rasio kemandirian sebagai alat ukur untuk menunjukkan kemandirian suatu pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan daerahnya. Jika pada suatu daerah bantuan transfer dari pemerintah masih tinggi daripada pendapatan asli daerah maka daerah tersebut dapat dikatakan belum mampu dalam membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah, sehingga tingkat kinerja keuangan daerah belum baik.
3. Rasio desentralisasi fiskal digunakan untuk menunjukkan tanggungjawab pemerintah daerah dalam pembangunan otonomi daerah oleh pemerintah pusat. Semakin tinggi peranan pendapatan asli daerah maka tingkat desentralisasi fiskal dikatakan baik, sehingga kinerja keuangan juga baik.
4. Rasio efektivitas digunakan untuk menunjukkan tingkat efektivitas pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah sesuai dengan target yang ditetapkan sebelumnya. Jika realisasi pendapatan asli daerah sesuai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan maka kinerja keuangan daerah dilihat dari efektivitas sudah efektif.
5. Rasio efisiensi digunakan untuk mengukur efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah melalui perbandingan belanja daerah dan pendapatan daerah. Jika pengeluaran belanja daerah lebih besar daripada perolehan

pendapatan daerah maka kinerja keuangan daerah dikatakan belum efisien.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah wilayah Karesidenan Kediri pada tahun 2020-2023 jika diukur menggunakan rasio kemandirian?
2. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah wilayah Karesidenan Kediri pada tahun 2020-2023 jika diukur menggunakan rasio desentralisasi fiskal?
3. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah wilayah Karesidenan Kediri pada tahun 2020-2023 jika diukur menggunakan rasio efektivitas?
4. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah wilayah Karesidenan Kediri pada tahun 2020-2023 jika diukur menggunakan rasio efisiensi?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah wilayah Karesidenan Kediri pada tahun 2020-2023 jika diukur menggunakan rasio kemandirian.
2. Untuk kinerja keuangan pemerintah daerah wilayah Karesidenan Kediri pada tahun 2020-2023 jika diukur menggunakan rasio desentralisasi fiskal.
3. Untuk kinerja keuangan pemerintah daerah wilayah Karesidenan Kediri pada tahun 2020-2023 jika diukur menggunakan rasio efektivitas.
4. Untuk kinerja keuangan pemerintah daerah wilayah Karesidenan Kediri pada tahun 2020-2023 jika diukur menggunakan rasio efisiensi.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan teori tentang kinerja keuangan daerah. Selain itu diharapkan dapat memperluas ilmu khususnya dalam lingkup kinerja pemerintahan daerah

2. Secara Praktis

a. Bagi Akademisi

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan acuan bagi pemenuhan tugas terkait analisis kinerja keuangan daerah menggunakan rasio keuangan.

b. Bagi Pemerintah Daerah Khususnya Karesidenan Kediri

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberi informasi bagi pemerintah terkait pengukuran kinerja keuangan daerah dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah khususnya pemerintah daerah wilayah Karesidenan Kediri.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang terkait dengan bidang keuangan daerah serta dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai kinerja keuangan daerah.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini ruang lingkungnya mencakup wilayah Karesidenan Kediri yang terdiri dari Kota Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten Trenggalek

2. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu pada rasio keuangan yang digunakan dalam meneliti, yaitu hanya terdapat empat rasio keuangan yang terdiri dari rasio kemandirian, rasio rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi pada periode 2020-2023.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian hasil kerja pemerintah daerah di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dalam satu periode anggaran.¹⁵ Salah satu alat untuk menganalisis dan mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya yaitu dengan analisis rasio keuangan daerah.

Rasio kemandirian merupakan gambaran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan daerahnya. Rasio desentralisasi fiskal adalah gambaran tingkat kontribusi PAD terhadap

¹⁵ Tumija dan Gina Shinta, "Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik* 9, no. 2 (2022): 62.

total penerimaan daerah. Rasio efektivitas merupakan gambaran kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan target. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.¹⁶

2. Definisi Operasional

Definisi operasional yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu mengukur kinerja keuangan daerah menggunakan empat rasio keuangan daerah. Rasio kemandirian ditunjukkan melalui perbandingan antara pendapatan asli daerah dengan bantuan pemerintah dan pinjaman. Rasio desentralisasi fiskal ditunjukkan oleh perbandingan antara pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio efektivitas ditunjukkan oleh perbandingan antara realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dengan target penerimaan pendapatan asli daerah. Rasio efisiensi ditunjukkan oleh perbandingan antara pengeluaran belanja dengan realisasi penerimaan.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini membahas latar belakang masalah, identifikasi masalah, Rumusan masalah yang diteliti, tujuan dan kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian. Bab ini juga menjelaskan gambaran permasalahan penelitian.

¹⁶ Novira Sartika, "Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti," *Jurnal Inovasi Bisnis* 7 (2019): 148–49.

BAB II Landasan Teori

Pada bab ini berisi penjelasan teori-teori yang digunakan, penelitian Terdahulu untuk mendukung penelitian ini, dan kerangka konseptual.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini berisi metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling, dan sampel penelitian, sumber data, variabel dan skala pengukuran, serta teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian

Pada bab ini menjelaskan hasil dari penelitian yang berisi deskripsi tempat penelitian, deskripsi data penelitian.

BAB V Pembahasan Hasil Penelitian

Pada bab ini berisi pembahasan secara rinci mengenai hasil penelitian dan hasil data.

BAB VI Penutup

Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian, dan saran yang berkaitan dengan penelitian. Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi, dan daftar riwayat hidup.